

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara (Mulyadi, Anwar & Krisma, 2014). Pajak diciptakan untuk menawarkan dukungan keuangan untuk kebutuhan warga dan merupakan sarana untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan mempromosikan kesetaraan di antara warga negara (Knuutinen, 2013).

Salah satu sumber untuk pembangunan negara berasal dari pajak. Namun, wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak kepada negara. Dalam penelitian Irianto, Sudibyo, dan Wafirli (2017), untuk memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan nasional maupun multinasional, adakala perusahaan melakukan perencanaan untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang dibayar. Perusahaan mengurangi kewajiban wajib pajak dengan membentuk strategi keuangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Hutagoal, 2007).

Penghindaran Pajak merupakan salah satu permasalahan besar, mengingat kompleksitas dan konsekuensi ekonomi (OECD, 2013). Praktik pajak perusahaan yang agresif menghalangi pemerintah untuk memperoleh sumber daya, hal ini juga mendapat perhatian dari seluruh dunia dan pembuat kebijakan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2007). Hundal (2011) berpendapat bahwa penghindaran pajak perusahaan tampaknya menjadi masalah yang paling menantang bagi negara maju dan negara berkembang karena dapat menyebabkan kerugian pendapatan pemerintah.

Di Indonesia, wajib pajak menganggap pajak sebagai beban usaha. Pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan, penghindaran pajak bermanfaat bagi pemegang saham (Chen *et al.*, 2008). Distribusi saham di antara pemegang

saham memiliki dampak signifikan pada aksi korporasi yang tergantung pada *voting* pemegang saham. Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan dan kebebasan untuk menentukan keputusan yang penting (Gugler, 2003). Struktur kepemilikan telah dianggap memberikan insentif pemantauan yang lebih baik, dan mengarah pada kinerja yang unggul (Leech & Leahly, 1991). Di sisi lain, itu juga dapat mengarah pada pengambilan manfaat pribadi oleh pemegang saham pengendali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Ongore, 2011).

Struktur kepemilikan dapat dijadikan sebagai determinan penghindaran pajak perusahaan mengingat kepentingannya dalam pengaturan perusahaan (Shackelford & Shelvin, 2001). Di negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas perusahaan dikendalikan oleh kepemilikan keluarga (Sunaryo, 2016). Perusahaan kepemilikan keluarga berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Bisnis keluarga merupakan organisasi yang melibatkan anggota keluarga dalam memimpin usaha internal dan pengambil keputusan terbesar. Biasa bisnis tersebut dijalankan dari generasi ke generasi yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan (Chen *et al.*, 2007).

Perusahaan kepemilikan non-keluarga di Indonesia seperti kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Dalam dua dekade terakhir, kepemilikan asing di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga sistem persaingan (Idzni & Purwanto, 2017). Christensen dan Murphy (2004) berpendapat bahwa kepemilikan asing dapat dikaitkan dengan profitabilitas dan efisiensi tinggi memungkinkan kepemilikan asing melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional juga berperan sebagai tata kelola terbesar di perusahaan dimana cenderung bisa memengaruhi perbuatan manajemen (Machmud & Djakman, 2008). Pemilik institusi menggunakan pengaruh dan suara mereka secara langsung untuk memantau dan, mempengaruhi strategi pajak (Bird & Karolyi, 2017). Kepemilikan saham oleh manajemen dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak karena pertimbangan yang dilakukan akan berdampak pada entitasnya (Mais & Patminingih, 2017).

Pajak merupakan biaya yang paling besar di perusahaan, sehingga manajer akan berusaha memperkecil biaya pajak dan memperbesar pendapatan setelah pajak

(Gaaya *et al.*, 2017). Menurut Edwin dan Victor (2019), manajemen menjalankan perusahaan dan menyarankan strategi harus melewati persetujuan dari dewan, maka peran dewan komisaris penting dalam pengembangan tata kelola yang efektif. Pembentukan tata kelola perusahaan dapat menentukan pengaruh perusahaan dalam mengelola pajak. Aspek yang dijadikan sebagai penentuan tata kelola perusahaan yaitu karakteristik dewan berupa jumlah komposisi dewan, independensi dewan dan frekuensi rapat dewan (Barros & Sarmiento, 2019; Dewi & Jati, 2014).

Selain struktur kepemilikan dan karakteristik dewan, kesulitan finansial juga merupakan faktor penghindaran pajak perusahaan. Kesulitan finansial terjadi ketika keadaan keuangan perusahaan hampir mencapai tingkat risiko kebangkrutan (Putri & Chariri, 2017). Perencanaan pajak dirancang untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Oleh karena itu, penghematan pajak dapat menjadi agenda manajemen perusahaan sebagai rencana ketika menghadapi kesulitan keuangan (Richardson *et al.*, 2015).

Praktik penghindaran pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang disebutkan sebelumnya. Namun, saat ini masih kurang studi mengenai struktur kepemilikan, karakteristik dewan dan kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan pengetahuan yang lebih lanjut tentang dampak struktur kepemilikan, karakteristik dewan dan kesulitan finansial terhadap praktik pelaporan pajak perusahaan. Literatur ini menggunakan data keuangan yang dipublikasikan dan informasi perusahaan dari berbagai industri serta membandingkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Umumnya, penelitian tersebut berfokus untuk memberikan analisis tentang pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik dewan dan kesulitan finansial terhadap pelaporan pajak perusahaan publik yang terdaftar dalam BEI periode 2014 hingga 2018. Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan yaitu **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Karakteristik Dewan dan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Urgensi Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikemukakan adalah pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik dewan dan

kesulitan finansial beserta variabel lainnya seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *market to book value* terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut mengolah informasi guna untuk melandasi fakta penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha di Indonesia dan membantu pemerintah dalam memperoleh dana untuk membangun negara.

Di Indonesia, sekitar 80% badan usaha melakukan tindakan penghindaran pajak sisanya adalah perorangan dan angka penghindaran pajak mencapai 110 triliun rupiah setiap tahun (Himawan, 2017). Indonesia memperoleh peringkat ke 11 di dunia sebagai negara dimana perusahaan tidak membayar pajak ke negara. Penghindaran pajak ini dapat menimbulkan resiko yang terlihat seperti denda dan biaya hukum, tidak terlihat seperti risiko meningkat dan rusaknya reputasi perusahaan (Susilo, 2017). Salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang bergerak bidang pertambangan pada tahun 2019. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa perusahaan Adaro menurunkan pajak yang dibayar dengan menyelipkan penghasilan perusahaan ke negara lain. PT Adaro Energy Tbk diindikasikan mengurangi tagihan pajak sebesar 14 juta AS per tahun (Friana, 2019). Tindakan tersebut merugikan pemerintah Indonesia dalam rangka perolehan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan implikasi penelitian mengenai pembahasan pengaruh terjadinya penghindaran pajak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian tersebut akan membahas masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak?

5. Apakah terdapat pengaruh jumlah komposisi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah terdapat pengaruh rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah terdapat pengaruh kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang akan dikemukakan dalam mengamati pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik dewan, dan kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak yaitu:

1. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.
5. Pengaruh jumlah komposisi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
6. Pengaruh independensi dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
7. Pengaruh rapat dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
8. Pengaruh kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut yaitu:

1. Memberikan wawasan mengenai pengaruh struktur kepemilikan, karakteristik dewan komisaris dan kesulitan finansial terhadap penghindaran pajak kepada mahasiswa, peneliti, dan akademis.
2. Memberikan informasi mengenai perpajakan khususnya penghindaran pajak kepada investor dalam memilih investasi saham yang menguntungkan.
3. Memberikan informasi perpajakan yang penting untuk pemerintah dalam peninjauan perlakuan perusahaan terhadap pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian beserta sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi definisi teori variabel yang akan mendasari penelitian tersebut, beserta model penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang berupa pendekatan penelitian, objek penelitian, metode pengukuran variabel, serta langkah-langkah perolehan data.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang telah dan diperoleh dan diujikan, yang berupa uji variabel, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis model.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, pembahasan, keterbatasan penelitian beserta saran untuk penelitian selanjutnya.